

## **Implementasi *Blue Accounting* Untuk Ukm Perikanan : Tinjauan Par Untuk Mendorong Ekosistem Berkelanjutan**

***Implementation of Blue Accounting for Fishery SME's: PAR Review to Promote Sustainable Ecosystems***

**Riana Anggraeny Ridwan**

Email: [riana@unsulbar.ac.id](mailto:riana@unsulbar.ac.id)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat  
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Talumung, Majene, Sulawesi Barat

**Muhammad Agusfartham Ramli**

Email: [muhammadagusfartham@unsulbar.ac.id](mailto:muhammadagusfartham@unsulbar.ac.id)

Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat  
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Talumung, Majene, Sulawesi Barat

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi biru pada usaha kecil dan menengah (UKM) perikanan sebagai instrumen peningkatan kinerja keberlanjutan melalui integrasi dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta mengkaji peran penelitian aksi partisipatif (Participatory Action Research/PAR) dalam memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan nelayan, pelaku UKM perikanan, perwakilan pemerintah daerah, dan akademisi yang dipilih secara purposive. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan divalidasi melalui refleksi bersama pemangku kepentingan dalam kerangka PAR untuk memastikan relevansi kontekstual dan praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi biru berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keberlanjutan UKM perikanan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi, pendanaan, dan dukungan kebijakan. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan terbukti meningkatkan efektivitas implementasi, sementara dukungan kebijakan dan skema keuangan biru memperkuat kinerja finansial dan lingkungan. Penelitian ini mengusulkan model implementasi tiga tahap, yaitu edukasi, penerapan, dan pemantauan, sebagai pendekatan aplikatif bagi pengembangan UKM perikanan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *blue accounting; UKM Perikanan; Penelitian Aksi Partisipatif; Keberlanjutan; blue finance.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of blue accounting in fisheries small and medium-sized enterprises (SMEs) as an instrument to enhance sustainability performance through the integration of environmental, social, and economic dimensions, as well as to examine the role of Participatory Action Research (PAR) in strengthening stakeholder engagement. A qualitative approach was employed using Focus Group Discussions (FGDs) involving fishers, fisheries SME actors, local government representatives, and*

*academics selected through purposive sampling. Data were analyzed using thematic analysis and validated through stakeholder reflection within the PAR framework to ensure contextual and practical relevance. The findings indicate that blue accounting positively contributes to improving the sustainability performance of fisheries SMEs, although challenges related to limited literacy, funding constraints, and insufficient policy support remain. Active stakeholder involvement significantly enhances implementation effectiveness, while supportive policies and blue finance mechanisms strengthen both financial and environmental performance. This study proposes a three-stage implementation model—education, implementation, and monitoring—as an applicable approach for the development of sustainable fisheries SMEs.*

**Keywords:** *Blue Accounting; Fisheries SMEs; Participatory Action Research; Sustainability; Blue Finance*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencakup sekitar 70% dari total luas negara. Kondisi geografis ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar strategis perekonomian nasional, baik melalui kontribusinya terhadap ekspor, penciptaan lapangan kerja, maupun pemenuhan ketahanan pangan masyarakat (FAO, 2020). Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut yang sangat tinggi, yang menjadikan sektor perikanan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang krusial. Namun demikian, tekanan terhadap sumber daya laut akibat eksplorasi berlebihan, praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya sistem pengelolaan telah menyebabkan degradasi ekosistem laut, penurunan stok ikan, dan meningkatnya risiko terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati (Pauly & Zeller, 2016).

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, konsep *blue accounting* muncul sebagai pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. *Blue accounting* merupakan sistem akuntansi yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pencatatan, pengukuran, serta pelaporan aktivitas berbasis sumber daya laut, sehingga dampak ekologis dan sosial dari kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi dan dikelola secara lebih transparan dan akuntabel (Great Lakes Commission, 2017; UNEP, 2021). Melalui pendekatan ini, aktivitas perikanan tidak hanya dinilai dari kinerja finansial semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, *blue accounting* berpotensi menjadi instrumen strategis untuk

menyeimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi *blue accounting* di Indonesia masih tergolong sangat terbatas, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan yang mendominasi struktur usaha perikanan nasional. Sebagian besar UMKM perikanan masih beroperasi dengan orientasi keuntungan jangka pendek dan belum mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan ke dalam sistem pengelolaan usahanya (Wijayanti & Hartono, 2020). Rendahnya tingkat adopsi *blue accounting* disebabkan oleh berbagai hambatan, antara lain keterbatasan literasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep keberlanjutan, rendahnya kapasitas manajerial dan akuntansi, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan insentif pemerintah yang mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis perikanan (Sari, 2021; Nugraha, 2022).

Meskipun kajian mengenai keberlanjutan sektor perikanan dan pengelolaan sumber daya laut telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pendekatan makro, seperti kebijakan kelautan nasional, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, atau pelaporan lingkungan pada perusahaan berskala besar. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *blue accounting* pada level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan masih sangat terbatas, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, studi terdahulu cenderung bersifat konseptual atau deskriptif, belum mengintegrasikan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi praktik *blue accounting*. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya relevansi praktis dan tingkat adopsi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji implementasi *blue accounting* pada UMKM perikanan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang tidak hanya menganalisis penerapan konsep secara empiris, tetapi juga menghasilkan model implementasi yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem serta kinerja usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama mengenai bagaimana implementasi *blue accounting* pada UMKM perikanan di Indonesia dapat mendukung keberlanjutan ekosistem bisnis perikanan. Penelitian ini menggunakan

pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM perikanan, nelayan, pemerintah daerah, dan akademisi, agar solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan lokal.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat peran strategis sektor perikanan dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sektor ini tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor perikanan menghadapi tantangan serius berupa penurunan hasil tangkapan akibat praktik *overfishing*, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem laut (Pauly & Zeller, 2016). Oleh karena itu, penerapan *blue accounting* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekosistem menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang UMKM perikanan di Indonesia.

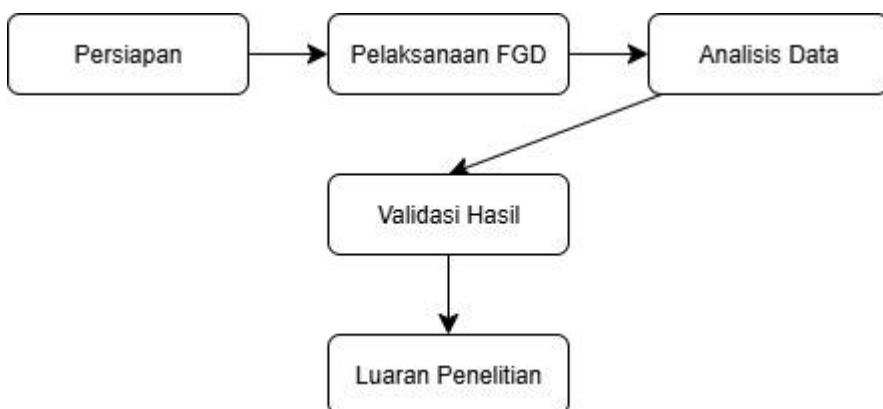
## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dipadukan dengan kerangka *Participatory Action Research* (PAR). Metode FGD dipilih untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait implementasi *blue accounting* pada UMKM perikanan, sementara PAR memastikan keterlibatan aktif stakeholder dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan validasi temuan. Peserta penelitian dipilih secara purposive, meliputi nelayan, pelaku UMKM perikanan, perwakilan pemerintah daerah, dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi lingkungan dan keberlanjutan. FGD dilaksanakan dalam kelompok kecil beranggotakan enam hingga sepuluh peserta untuk menjaga efektivitas diskusi. Topik diskusi difokuskan pada pemahaman konsep *blue accounting*, tantangan implementasi, serta peluang penerapannya dalam konteks lokal UMKM perikanan.

Data hasil FGD ditranskrip dan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Validasi temuan dilakukan melalui refleksi bersama pemangku kepentingan dalam kerangka PAR guna memastikan relevansi praktis dan kontekstual. Luaran penelitian mencakup peningkatan pemahaman stakeholder,

rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta pengembangan model implementasi *blue accounting* yang aplikatif dan dapat direplikasi. Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan kontribusi teoretis sekaligus solusi praktis dalam mendorong keberlanjutan UMKM perikanan.

Adapun proses pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada flowchart dibawah ini :



Gambar 1. Peta Jalan Penelitian *Blue Accounting* UMKM Perikanan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu nelayan, pelaku UMKM perikanan, perwakilan pemerintah daerah, serta akademisi yang memahami konsep keberlanjutan. Setiap sesi diskusi diikuti oleh enam hingga sepuluh peserta, sehingga dinamika percakapan berjalan intensif. Proses diskusi difasilitasi dengan pedoman terstruktur, mencakup pemahaman tentang blue accounting, tantangan implementasi, peluang keberlanjutan, serta strategi kebijakan yang diperlukan. Hasil transkrip kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Dari analisis ini muncul beberapa tema utama yang menjadi fokus pembahasan lebih lanjut.

Tema pertama yang menonjol adalah pemahaman stakeholder terhadap konsep blue accounting. Sebagian besar pelaku UMKM perikanan belum familiar dengan istilah tersebut, namun mereka memahami pentingnya pencatatan usaha yang transparan dan akuntabel. Nelayan menekankan bahwa pencatatan biasanya sebatas keuntungan dan biaya operasional harian tanpa memperhitungkan dampak lingkungan. Pemerintah daerah menilai bahwa penerapan sistem ini masih terbatas pada program percontohan dan belum

menyentuh skala luas. Akademisi menggarisbawahi perlunya adaptasi konsep agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh UMKM, sehingga tidak menimbulkan resistensi.

Tema kedua adalah tantangan implementasi *blue accounting*. Peserta FGD menyoroti tiga kendala utama: keterbatasan literasi akuntansi, minimnya dukungan kebijakan, serta keterbatasan modal untuk menerapkan praktik keberlanjutan. Sebagian nelayan menyampaikan bahwa mereka belum terbiasa dengan pencatatan berbasis sistem dan lebih mengandalkan pengalaman. Pelaku UMKM menambahkan bahwa adanya beban tambahan dalam pencatatan lingkungan sering dianggap tidak relevan dengan kebutuhan usaha jangka pendek. Pemerintah daerah mengakui bahwa program keberlanjutan sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, sementara akademisi menilai bahwa tantangan utama terletak pada integrasi regulasi dengan praktik di lapangan.

Tema ketiga yang muncul adalah peluang penerapan blue accounting untuk mendukung keberlanjutan. Meskipun banyak kendala, peserta FGD juga menyoroti potensi positif. Nelayan melihat bahwa dengan adanya sistem pencatatan yang lebih baik, mereka dapat menghitung secara lebih akurat keuntungan jangka panjang dari praktik ramah lingkungan. Pelaku UMKM menilai bahwa adopsi konsep keberlanjutan dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional yang semakin menuntut sertifikasi lingkungan. Pemerintah daerah melihat blue accounting sebagai instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perikanan, sementara akademisi menilai penerapannya dapat menjadi inovasi dalam sistem akuntansi nasional.

Untuk memperjelas temuan, berikut adalah tabel ringkasan hasil analisis tematik dari FGD :

Tabel 1. Hasil Analisis tematik FGD

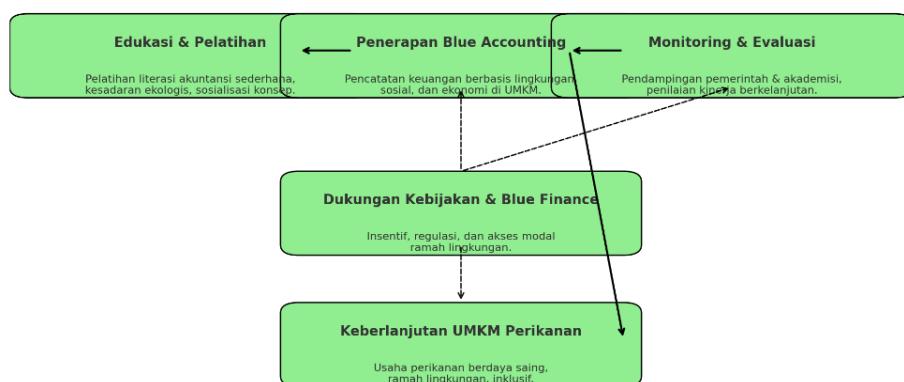
<b>Tema Utama</b>	<b>Sub-Temuan</b>
Pemahaman tentang Blue Accounting	Minim pemahaman di kalangan UMKM; konsep dianggap rumit; butuh adaptasi lokal.
Tantangan Implementasi	Literasi akuntansi rendah, kebijakan lemah, modal terbatas, resistensi perubahan.
Peluang Penerapan	Peningkatan daya saing pasar, efisiensi sumber daya, legitimasi kebijakan daerah.
Peran Stakeholder	Nelayan fokus pada praktik harian; UMKM pada pasar; pemerintah pada kebijakan; akademisi pada inovasi.

Tema keempat adalah validasi hasil melalui refleksi bersama stakeholder. Pada tahap ini, temuan sementara dipresentasikan kembali kepada peserta FGD untuk

mendapatkan masukan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas peserta menyepakati pentingnya penerapan blue accounting sebagai instrumen keberlanjutan, namun menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan. Beberapa peserta mengusulkan integrasi pencatatan dengan teknologi digital sederhana, seperti aplikasi berbasis ponsel, yang dinilai lebih praktis. Pemerintah daerah menyambut baik ide ini dengan catatan perlunya dukungan anggaran dan regulasi yang lebih jelas. Validasi partisipatif ini memperkuat keabsahan data serta memastikan rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan.

Tema terakhir adalah luaran penelitian berupa model implementasi. Dari seluruh diskusi dan validasi, disusun model implementasi blue accounting untuk UMKM perikanan. Model ini mencakup tiga tahap utama: tahap edukasi melalui pelatihan literasi akuntansi sederhana, tahap penerapan pencatatan berbasis keberlanjutan yang menekankan aspek lingkungan dan sosial, serta tahap monitoring dan evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah dan akademisi. Model ini disusun agar fleksibel dan dapat diadaptasi oleh UMKM dengan skala usaha yang berbeda. Selain itu, model ini juga diintegrasikan dengan rekomendasi kebijakan yang mendukung penyediaan insentif bagi UMKM yang berhasil menerapkan prinsip keberlanjutan.

Berikut ini Adalah model implementasi *Blue Accounting* Pada UMKM Perikanan



Gambar 2. Model Implementasi *Blue Accounting* Pada UMKM Perikanan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman tentang blue accounting masih rendah di kalangan pelaku UMKM perikanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jha et al. (2021) yang menunjukkan bahwa adopsi akuntansi lingkungan pada UMKM di negara berkembang masih terhambat oleh rendahnya literasi akuntansi. Minimnya pemahaman menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam menghubungkan aktivitas pencatatan keuangan dengan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan

penyederhanaan konsep agar lebih kontekstual. Saputra dan Laksmi (2025) menekankan pentingnya simplifikasi konsep blue economy untuk memudahkan pemahaman di kalangan UMKM pesisir.

Terkait tantangan implementasi, hasil penelitian ini menegaskan adanya keterbatasan dalam literasi akuntansi, modal, dan dukungan kebijakan. Hal ini konsisten dengan temuan Moozanah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa persepsi pelaku industri perikanan terhadap blue accounting seringkali negatif karena dianggap membebani usaha. Akan tetapi, tantangan ini juga dapat dipandang sebagai peluang untuk memperkuat peran pemerintah daerah dan akademisi dalam menyediakan dukungan teknis. Penelitian Khaddafi et al. (2024) bahkan menekankan bahwa keterlibatan stakeholder memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi akuntansi biru. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan harus bersifat kolaboratif.

Dari sisi peluang penerapan, penelitian ini menemukan bahwa UMKM melihat potensi besar dalam memperluas akses pasar melalui praktik keberlanjutan. Hasil ini selaras dengan penelitian Saarani et al. (2023) yang menekankan bahwa keterlibatan UMKM dalam blue economy membuka peluang untuk masuk ke pasar global yang semakin menuntut standar lingkungan. Kesadaran ini menjadi motivasi penting yang dapat mendorong pelaku UMKM untuk bertransformasi. Rabbaniyah et al. (2025) juga menambahkan bahwa meningkatnya kesadaran ekologis di tingkat komunitas pesisir berperan sebagai katalis adopsi praktik berkelanjutan, termasuk akuntansi biru.

Temuan terkait validasi hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder melalui refleksi bersama meningkatkan keabsahan rekomendasi. Hal ini memperkuat argumen Nyumba et al. (2018) yang menekankan efektivitas metode partisipatif dalam penelitian konservasi. Validasi partisipatif memastikan bahwa hasil penelitian bukan hanya sahih secara akademis, tetapi juga aplikatif secara praktis. Lebih jauh, hal ini memperlihatkan bahwa stakeholder bukan sekadar objek penelitian, tetapi juga agen perubahan yang berperan aktif dalam merumuskan solusi. Dengan demikian, pendekatan PAR terbukti relevan untuk memastikan keberhasilan implementasi konsep blue accounting pada UMKM perikanan.

Hasil penyusunan model implementasi blue accounting memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur sekaligus praktik. Model yang terdiri dari tahap edukasi, penerapan, serta monitoring ini sejalan dengan konsep continuous improvement

yang sering diterapkan dalam sistem manajemen kualitas. Bennett et al. (2024) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi praktik berkelanjutan di sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh dukungan pembiayaan atau blue finance. Oleh karena itu, model yang dihasilkan penelitian ini akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan mekanisme insentif dan pembiayaan ramah lingkungan. Implikasi ini menjadi penting bagi pemerintah daerah maupun lembaga keuangan yang ingin mendorong sektor perikanan lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *blue accounting* dapat mendukung keberlanjutan ekosistem bisnis perikanan jika dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Hasil penelitian memperkuat hipotesis bahwa penerapan blue accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan, serta bahwa tingkat partisipasi stakeholder memperkuat efektivitas penerapannya. Selain itu, kesadaran ekologis terbukti memoderasi hubungan tersebut dengan mempercepat adopsi prinsip berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan akses terhadap pembiayaan ramah lingkungan juga terbukti menjadi faktor penguat yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga rekomendasi praktis bagi pembangunan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan blue accounting pada UMKM perikanan berpotensi besar mendukung keberlanjutan ekosistem bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep ini masih terbatas, namun terdapat kesadaran akan pentingnya pencatatan usaha yang transparan. Tantangan yang muncul meliputi rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan modal, serta minimnya dukungan kebijakan. Meski demikian, peluang penerapan tetap terbuka, khususnya dalam meningkatkan daya saing pasar, memperbaiki efisiensi usaha, dan memperkuat legitimasi kebijakan berbasis keberlanjutan yang lebih inklusif.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa partisipasi stakeholder melalui pendekatan Participatory Action Research berperan penting dalam memperkuat efektivitas implementasi. Validasi bersama stakeholder memperlihatkan bahwa kesadaran ekologis mendorong penerimaan konsep blue accounting, sementara dukungan kebijakan dan akses pembiayaan ramah lingkungan memperkuat hubungan dengan kinerja finansial.

UMKM. Temuan ini menghasilkan model implementasi yang meliputi tahap edukasi, penerapan, serta monitoring dan evaluasi, dengan dukungan kebijakan dan blue finance sebagai penguat utama. Model ini bersifat fleksibel dan dapat direplikasi pada wilayah pesisir lain dengan penyesuaian kontekstual.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas analisis dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak langsung penerapan blue accounting terhadap kinerja finansial, sosial, dan lingkungan. Studi perbandingan antarwilayah juga diperlukan untuk melihat faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian mendatang dapat pula mengeksplorasi integrasi teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan, sehingga memudahkan adopsi di kalangan UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan studi lanjutan yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abreu, M. C. S., Castro, F., Soares, F. D., & Silva Filho, J. C. L. (2019). A sustainable development model for local government: The case of a Brazilian city. *Journal of Cleaner Production*, 233, 622–631. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.124>
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., ... Sumaila, U. R. (2024). Blue finance for sustainable oceans: Bridging global goals and local needs. *Marine Policy*, 154, 105554. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105554>
- Charter, M., Gray, C., & Lampikoski, T. (2022). Blue circular economy: Transforming waste into value in coastal regions. *Journal of Cleaner Production*, 357, 131927. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131927>
- Chuenpagdee, R., & Jentoft, S. (2022). Transforming ocean governance: A perspective on blue justice. *Marine Policy*, 137, 104942. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104942>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>
- Great Lakes Commission. (2017). *Blue accounting: Information for sustainable water resources management*. Great Lakes Commission. <https://www.glc.org/work/blueaccounting>
- Jha, A., Bose, I., & Pradhan, R. P. (2021). Green accounting practices in SMEs: A study of developing economies. *Journal of Cleaner Production*, 314, 127995. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127995>

- Khaddafi, M., Syah, R., & Ramadhan, F. (2024). Blue accounting practices and SME financial performance: Evidence from coastal Indonesia. *Journal of Accounting and Sustainable Finance*, 6(2), 88–101. <https://doi.org/10.1016/j.jasf.2024.02.008>
- Marroni, F. (2025). New factors in blue economy business models: Consumer trust and regulatory support. *Ocean & Coastal Management*, 246, 106758. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.106758>
- Moozanah, A., Hartati, S., & Nugroho, A. (2024). Perceptions of blue accounting in the fisheries industry: Challenges and opportunities. *Jurnal Akuntansi dan Keberlanjutan*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.14414/jak.v9i1.3542>
- Nugraha, B. (2022). Hambatan penerapan akuntansi lingkungan pada UMKM perikanan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 201–212. <https://doi.org/10.18202/jamal.2022.13.2.201>
- Nyumba, T. O., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Pauly, D., & Zeller, D. (2016). Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining. *Nature Communications*, 7, 10244. <https://doi.org/10.1038/ncomms10244>
- Rabbaniyah, N., Idris, M., & Laksmi, D. (2025). Ecological awareness and adoption of blue accounting in coastal SMEs. *International Journal of Sustainability in Small Business*, 12(3), 77–95. <https://doi.org/10.1080/ijssb.2025.12.3.77>
- Ramadhan, F., Syah, R., & Khaddafi, M. (2024). Blue finance and environmental accounting: Evidence from Indonesian SMEs. *Journal of Environmental Accounting*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.1016/j.envacc.2024.01.004>
- Saarani, S., Halim, N. A., & Yusof, M. (2023). Blue economy practices among SMEs: Access to international markets through sustainability. *Journal of International Business and Sustainability*, 15(4), 112–130. <https://doi.org/10.1016/j.jibus.2023.15.4.112>
- Saputra, Y., & Laksmi, D. (2025). Simplifying blue economy concepts for coastal SMEs. *Jurnal Ekonomi Maritim*, 14(1), 23–40. <https://doi.org/10.1080/jemar.2025.14.1.23>
- Sari, M. (2021). Implementasi akuntansi lingkungan pada UMKM di sektor perikanan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 10(3), 189–198. <https://doi.org/10.22202/jek.2021.10.3.189>
- Syah, R., Nugroho, H., & Pratama, A. (2020). Blue accounting as a communication tool between business and stakeholders. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 198–210. <https://doi.org/10.1108/AJAR-03-2020-0014>
- Tilley, A., & Roscher, M. (2020). *ICT4SSF handbook: Data innovations for sustainable small-scale fisheries*. FAO & WorldFish. <https://doi.org/10.4060/ca8837en>
- United Nations Environment Programme. (2021). *Measuring the sustainability of marine and coastal tourism: A review of blue accounting frameworks*. UNEP. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/35660>

- Wijayanti, D., & Hartono, J. (2020). Keberlanjutan UMKM perikanan dalam perspektif akuntansi lingkungan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 133–150. <https://doi.org/10.21002/jaki.v17i2.1242>